

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pasca pemilu 2004, munculnya sosok Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya akan disingkat menjadi “SBY”) sebagai pemimpin kharismatik yang merepresentasikan wibawa dari latar belakang militernya hadir sebagai alternatif baru Presiden pasca gejolak reformasi yang dianggap gagal menghasilkan sosok pemimpin yang mampu memberikan implikasi bagi perubahan-perubahan yang mendasar dan bermakna terhadap sistem politik Indonesia dan upaya pencapaian kepentingan Nasional Indonesia di dalam negeri maupun di forum Internasional.

Indonesia dibawah kepemimpinan SBY terbukti mampu melewati masa-masa sulit kepemimpinannya di periode pertama pemerintahannya ketika harus membangkitkan kembali citra positif Indonesia dimata dunia sebagai negara yang bersih dari terorisme melalui pencapaian gemilang militer Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme berskala Internasional. Pencapaian ini terasa sangat berpengaruh dalam pemulihan citra negara pasca banyaknya WNA yang menjadi korban dalam peristiwa terosme bom Bali 1 dan rangkaian terror lainnya yang menjadikan simbol representasi suatu negara seperti kedutaan besar atau perusahaan/hotel asing sebagai objek terror di penghujung tahun 2002 serta

rentetan bencana alam dengan skala global seperti Tsunami di Aceh dan Gempa di Yogyakarta.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden SBY juga dianggap mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru seputar politik Internasional kontemporer seperti memperjuangkan posisi Indonesia dalam konfigurasi politik dan ekonomi global dalam rezim perdagangan dan moneter Internasional saat ini, mengkonversi sensitifnya isu HAM dan lingkungan hidup menjadi citra yang positif, serta menentukan sikap dalam dominasi ekonomi-politik AS dan perang melawan terorisme di forum global dimana sebagian besar dari tantangan tersebut merupakan hal baru dalam dinamika politik dunia yang belum pernah muncul di rezim pemerintahan sebelumnya.

Oleh karena pencapaian-pencapaian tersebut, SBY diapresiasi sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia dalam 100 tokoh paling berpengaruh versi *TIME* dari New York untuk kategori *Leader & Revolutionaries*<sup>1</sup> sementara salah satu menteri dalam kabinetnya yaitu Sri Mulyani terpilih sebagai menteri keuangan terbaik di dunia versi salah satu majalah lokal *Euro Money*. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengingat *TIME* tentu tidak akan sembarangan memberikan penghargaan kepada seseorang karena keteledoran seperti itu bisa mengancam atau mengerosi kredibilitasnya. *TIME* terkenal memiliki parameter yang jelas dalam memilih para kandidatnya dan untuk tahun 2009 parameter

---

<sup>1</sup> Majalah *TIME* serahkan Penghargaan, dalam [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses 10 Desember 2011

tokoh berpengaruh dunia itu adalah tokoh–tokoh yang mampu memengaruhi dunia dengan ide, visi dan aksi mereka untuk mengubah dunia serta berdampak kepada banyak orang. Jadi jelas bahwa tokoh berpengaruh di sini bukan merupakan daftar orang paling kuat atau paling pintar di dunia dan SBY merupakan satu–satunya kepala negara di Asia yang tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai tokoh berpengaruh versi *TIME*.<sup>2</sup>

Hal ini secara tidak langsung melejitkan popularitas SBY di kancah domestik maupun Internasional, yang secara tidak langsung pula meningkatkan nilai tawar Indonesia dalam upaya memperjuangkan kepentingan Nasionalnya. Popularitas SBY di periode pertama ini pula lah yang menjadi salah satu faktor kesuksesan SBY dalam meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia untuk kembali memenangkan Pemilu 2009 dalam 1 kali putaran.

Dengan pertimbangan tersebut diatas , penulis mensinyalir bahwa setelah rangkaian pencapaian gemilang kebijakan luar negeri Indonesia di periode pertama pemerintahan SBY, maka akan sangat menarik untuk mengikuti perubahan dan melihat arah perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia di periode kedua pemerintahan SBY, mengingat kompleksitas permasalahan di kancah Internasional semakin peka pengaruhnya terhadap stabilitas politik di kancah domestik dan upaya pencapaian kepentingan nasional secara umum. Untuk alasan itu, penelitian ini akan mengangkat judul DINAMIKA POLITIK

---

<sup>2</sup> Sukes SBY Masuk 100 Tokoh Berpengaruh Versi TIME, dalam [www.forsas.info](http://www.forsas.info), diakses pada 11 Desember 2011

LUAR NEGERI RI SELAMA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN SBY DAN KAITANNYA DENGAN UPAYA PENCAPAIAN TIGA KEPENTINGAN NASIONAL RI sebagai judul dari skripsi ini.

Penulis berpendapat bahwa dengan menarik kesimpulan dari rincian daftar kegiatan resmi kabinet keluar negeri dan tolak ukur kepentingan nasional yang ingin dicapai, maka akan diperoleh sebuah fakta baru yang mencerminkan pola politik luar negeri Indonesia maupun arah konsentrasi kebijakan negara serta gambaran tentang target kepentingan nasional yang ingin dicapai pemerintah Indonesia melalui produk-produk kebijakan luar negerinya dimasa mendatang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Arah politik luar negeri Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan sangat menarik untuk diamati. Sebagai negara yang pernah dijajah, perkembangan politik luar negeri yang dijalankan dan hubungan dengan negara-negara lain pun mengalami pasang surut. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka, merumuskan politik luar negerinya sebagai politik bebas aktif<sup>3</sup>. Bung Hatta melalui buku tulisan Beliau yang berjudul “Mendayung

---

<sup>3</sup> Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI, dalam [www.frenndw.wordpress.com](http://www.frenndw.wordpress.com)., diakses 20 Januari 2012

Diantara Dua Karang”<sup>4</sup> mencoba merumuskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sebagaimana yang pernah diutarakan Bung Hatta pada pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri (PM) Republik Indonesia di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 :

*“.....Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa...” (Bung Hatta, 1948).*

Seiring dengan diakuinya NKRI sebagai Negara yang berdaulat oleh dunia Internasional, maka secara naluriah Indonesia mulai mengenal makna vital kepentingan Nasional bangsa yang harus diperjuangkan dimata dunia. Indonesia, tidak bisa kita pungkiri, terletak di daerah yang strategis . Gelombang modernisasi menuntut Indonesia untuk jeli membaca peta potensi domestik yang mampu memperkuat *bargaining position* Indonesia dalam ruang lingkup Internasional. Disinilah transformasi fungsi politik luar negeri Indonesia pasca kemerdekaan mulai diaplikasikan untuk upaya pencapaian kepentingan Nasional.

Dimasa lalu, arah kebijakan Luar negeri Indonesia cenderung berorientasi pada upaya untuk memperkuat pengaruh Negara di kawasan Regional dimana mayoritas negara-negara dikawasan Asia Tenggara masih dalam pengaruh kolonial maupun baru terlepas dari belenggu penjajahan. Sisanya masih berkuat pada pemulihan stabilitas politik dan pembangunan internal setelah terkena

---

<sup>4</sup> Hatta, Mohammad. 1988. Mendayung Antara Dua Karang. Jakarta : Bulan Bintang, hal 17

imbas dari Perang Dunia ke- II yang membawa pengaruh 2 poros terkuat dunia ke Asia tenggara kala itu.

M. Leifer dalam bukunya *Indonesian's foreign policy* yang diterjemahkan oleh Drs. A. Ramlan Surbakti, MA menyatakan bahwa di era Demokrasi Terpimpin, yang diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ketika dengan dekrit dia menyatakan pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri oleh Soekarno merupakan suatu upaya untuk mengubah peranan Internasional yang terbatas dan juga untuk mendapatkan kedudukan terkemuka dan kepemimpinan di antara negara-negara pascakolonial lainnya<sup>5</sup>

Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum di Indonesia memang diwarnai begitu rupa oleh fenomena yang kompleks. Kompleksitas permasalahan ini kemudian tercermin dalam peta politik domestik dan karakter suatu pemerintahan dalam masing-masing periode tertentu kekuasaannya. Secara umum masyarakat Indonesia lebih mengenal 3 fase pemerintahan sepanjang sejarah rezim politik Indonesia, yaitu fase kekuasaan orde lama, orde baru dan era reformasi.

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas

---

<sup>5</sup> M. Leifer, *Indonesian's Foreign Policy*, edisi bahasa Indonesia Politik Luar Negeri Indonesia, diterjemahkan oleh Drs. A. Ramlan Surbakti, MA, PT Gramedia, Jakarta, 1986, p. 82.

tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) karena pemberontakan PKI, Nasakom, UUD sementara dan Demokrasi terpimpin. Gagasan konsolidasi politik mewarnai politik dalam negeri dan mulai berjalan karena Soekarno berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak mendukung gagasan demokrasi terpimpinnya. Salah satunya adalah Masyumi dan PSI yang dibubarkan oleh Soekarno September 1960.<sup>6</sup> Konsolidasi juga dilakukan dengan melakukan politik keseimbangan antara PKI dan militer yang semakin besar pengaruhnya. Artinya, dalam menentukan domestik dan Internasional bergerak dalam suatu irama yang mampu menjaga keseimbangan antara dua kekuatan tersebut secara efektif.<sup>7</sup>

Sementara di zaman Orde Baru, Indonesia dianggap sebagai Macan Asia oleh negara–negara tetangga dengan mantan Presiden Soeharto menjadi ‘‘pemimpin tidak resmi’’ dari para kepala negara di Asia Tenggara. Namun setelah krisis moneter mengguncang pada pertengahan 1997, Indonesia butuh waktu yang cukup lama untuk bangkit dari badai krisis sampai-sampai sempat dijuluki Barat sebagai ‘‘negara yang terancam gagal’’<sup>8</sup>. Selain itu, skandal politik serta KKN yang mengguncang rezim Orde baru di akhir kekuasaannya seperti menjadi anti-klimaks bagi seluruh pencapaian positif yang dilakukan pemerintahan sepanjang 32 tahun itu.

---

<sup>6</sup> G. Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Jakarta, 2008, p. 92.

<sup>7</sup> *Ibid*, p. 93.

<sup>8</sup> Sukes SBY Masuk 100 Tokoh Berpengaruh Versi TIME, *op.cit*.

Corak kepemimpinan dalam negeri kedua rezim pemerintahan tersebut tertuang pula dalam karakteristik produk kebijakan luar negeri mereka kala itu. Soekarno dengan politik konfrontasinya dan politik mercusuarinya cenderung ingin menjadi poros baru kekuatan dunia, sebagai alternatif kubu pilihan bagi negara-negara baru merdeka dan negara-negara dunia ketiga. Sementara pasca peralihan Orde lama ke Orde Baru yang ditandai dengan pergantian pucuk kepemimpinan di posisi RI-1 oleh Soeharto, warisan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Soekarno terkikis satu persatu. Seolah memang dengan maksud yang sama, Soeharto merubah kebijakan politik luar negeri konfrontasi peninggalan Soekarno dengan pendekatan *soft diplomacy* sebagai langkah perbaikan citra pemerintahan Indonesia di mata dunia. Soeharto dengan politik *soft diplomacy* nya menggeser kiblat politik Indonesia yang sempat “ketimuran” menjadi teman baik bagi segala produk kebijakan luar negeri negara-negara barat khususnya Amerika seperti IMF.

Untuk menggambarkan perkembangan politik luar negeri Indonesia dalam periode tersebut, dikenal istilah fase revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia dimana politik luar negeri diarahkan untuk menggalang pengaruh dunia Internasional guna mendukung perjuangan nasionalisme *self-determination* Indonesia dan fase revolusi sosial yakni perjuangan negara baru merdeka agar



menjadi negara independen bebas intervensi asing, dimana politik luar negeri diarahkan untuk perbaikan ekonomi dengan payung *self sufficiency*.<sup>9</sup>

Era reformasi bisa dikatakan sebagai titik nadir perkembangan diplomasi dan politik Luar negeri Indonesia dimana stabilitas politik dan keamanan domestik menyita sebagian besar perhatian pemerintah pusat. Hal ini diperparah dengan dampak krisis moneter yang dianggap mematahkan satu persatu “taring” Indonesia dikancah dunia ketika BUMN unggulan milik Indonesia seperti IPTN perlahan berjatuh sebagai korban langkah preventif untuk menjaga kestabilan ekonomi Negara.

Sistem politik luar negeri di Indonesia baru mulai menemukan ritmenya kembali dengan munculnya sosok SBY yang mampu mengobati kerinduan rakyat Indonesia akan seorang pemimpin yang berwibawa dengan latar belakang militer paska kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Popularitas SBY ( SBY) dengan kampanye pemerintahan bersihnya ternyata mampu meyakinkan rakyat Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia dalam 2 kali masa Jabatan.

Di periode pertama kepemimpinannya, SBY muncul dengan gebrakan-gebrakan fantastis dalam menjalankan pemerintahannya. Melalui pembentukan Bali Democracy Forum, SBY dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mempromosikan demokrasi sebagai sistem politik terbaik bagi negara manapun,

---

<sup>9</sup> Revolusi Indonesia dan Kelahiran Politik Luar Negeri Indonesia ,dalam [www.frenndw.wordpress.com](http://www.frenndw.wordpress.com), diakses 12 Februari 2012

termasuk bagi ASEAN. Di Universitas Harvard SBY mempesona forum dengan menekankan pentingnya toleransi antarperadaban.

Dibidang lingkungan, Indonesia menjadi tuan rumah World Ocean Conference di Manado dan United Nations Framework Convention on Climate Change di Bali. Ada pula janji bahwa pada 2020 Indonesia akan mengurangi emisi karbon hingga 26%. Di bidang ekonomi, reformasi good governance mendatangkan penghargaan Asian Finance Minister of the Year dari Emerging Market dan Finance Minister of The Year dari Euro Money untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani adalah tokoh sentral yang perannya sangat vital dalam membuat perekonomian Indonesia mampu bertahan disaat sebagian besar negara-negara di dunia terkena dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008. Di bidang kesehatan, terlepas dari merosotnya indeks pembangunan manusia di Indonesia, negara ini tampil keras di forum Internasional untuk mengkritik penanganan flu burung.<sup>10</sup>

Sementara di kancah domestik, kabinet Indonesia bersatu yang diusungnya bersama partai-partai koalisi berhasil menyuarakan konsep politik bersih yang ditandai dengan kuatnya *enforcement* terhadap para pelaku pidana korupsi dengan indikator banyaknya kasus pidana korupsi yang berhasil dituntaskan dan ditindak di pengadilan.

---

<sup>10</sup> Membangun Pijakan Politik Luar Negeri , dalam [www.okezone.com](http://www.okezone.com),2009, diakses 29 November 2011

Perubahan dalam struktur pemerintahan domestik pasca reformasi sendiri pada kenyataannya senada dengan fakta bahwa dari perspektif tatanan politik dunia kontemporer, Indonesia sedang dihadapkan pada beberapa kecenderungan dasar yang terjadi di panggung politik Internasional. Beberapa kecenderungan yang dimaksud yaitu<sup>11</sup> :

*Pertama*, adanya perubahan dalam konstelasi politik global dari bipolar ke multipolar. Tidak ada lagi persaingan ideologi Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang tampak dalam tata hubungan Internasional pasca-Perang Dingin adalah lebih kepada kemunculan kutub-kutub kerjasama yang berkembang diberbagai wilayah dan isu-isu global.

*Kedua*, menguatnya saling kebergantungan antarnegara dan saling keterkaitan antara beragam masalah global yang mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, sosial, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu adalah kecenderungan yang semakin kuat proses globalisasi khususnya dalam perekonomian Internasional dengan segala implikasinya. Batas negara yang tidak lagi menjadi kendala aliran barang, modal dan jasa telah membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk lebih terlibat dalam transaksi ekonomi dunia. Namun di sisi lain, keterbukaan transaksi itu masih belum menjamin berlangsungnya transaksi yang adil (*fair trade*). Kedua hal itu merupakan sisi positif dan negatif dari globalisasi.

---

<sup>11</sup> G. Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Jakarta, 2011, p. 215-217

*Ketiga*, terjadinya peningkatan peran aktor-aktor non negara dalam hubungan Internasional. Negara tidak lagi menjadi aktor yang semata menentukan dinamika dunia Internasional. Perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara dengan modal keuangan yang bahkan melebihi anggaran belanja negara berkembang cenderung dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik negara.

*Keempat*, munculnya isu-isu global baru dalam agenda Internasional. Terorisme dengan jaringan Internasional menjadi salah satu isu utama ancaman dunia. Selain masalah demokratisasi dan hak asasi manusia, persoalan keamanan global juga meliputi degradasi kondisi lingkungan yang mengancam banyak pihak dan solusinya harus melalui tindakan bersama.

*Kelima*, dunia Internasional usai Perang Dingin dihadapkan pada semangat untuk dapat lebih besar memperhatikan persoalan-persoalan keamanan yang terkait dengan keamanan manusia. Hal itu ditekankan agar biaya besar yang selama ini dikeluarkan untuk anggaran militer bisa dialokasikan bagi kegiatan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.

*Keenam*, usai persaingan Timur dan Barat dunia lebih dihadapkan pada perdebatan Utara-Selatan yang semakin menguat dalam upaya mencari solusi pembangunan yang berkeadilan. Pertentangan ini terlihat jelas, misalnya, dalam isu perdagangan dunia. Isu ini diwarnai tarik ulur kepentingan antara negara maju dan berkembang dalam soal pembukaan pasar negara berkembang tanpa adanya upaya negara maju untuk mengurangi subsidi produk domestiknya.

Ketidakkonsistensian ini juga terlihat dari upaya sulitnya produk negara berkembang masuk ke negara maju dengan dalih bermacam-macam.

Kenyataan ini memaksa Indonesia untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konstelasi global yang sedemikian drastis dan tidak lagi terbatas pada perspektif tradisional yang hanya mengandalkan satu aktor yaitu negara sebagai representasi kepentingan suatu bangsa dalam hubungan Internasional. Perubahan yang terjadi tersebut tidak dapat dipungkiri menimbulkan interpretasi ganda terhadap munculnya beraneka ragam tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia di masa mendatang.

Pada tataran praksis, politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun Internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, berikut susunan demografi, ekonomi yang mapan dan stabilitas sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara Indonesia memposisikan diri di forum Internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia, karena politik luar negeri menurut SBY adalah kelanjutan dari politik nasional kita, atau bagian dari upaya untuk mencapai kepentingan nasional kita. Untuk itu terhadap hiruk pikuk politik luar negeri, dinamika regional dan Internasional yang sangat tinggi,

Indonesia tidak boleh kehilangan orientasi, apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Pemerintahan ini.

Yang menjadi kepentingan dan misi dari pemerintahan untuk lima tahun mendatang salah satunya adalah melanjutkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan sasaran mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih pada tahun 2014 nanti. Pertumbuhan itu disertai pemerataan, agar dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan potensi sumber daya atau modal, dan sumber daya yang paling menonjol adalah investasi.

Investasi yang dimaksud dapat berasal dari, *pertama* pembiayaan dari pemerintah berupa subsidi atau penanaman modal dengan program, *government spending*. *Kedua*, mengundang sektor swasta dari dalam negeri di pusat atau di daerah untuk bekerja sama. *Ketiga*, mengundang pihak-pihak asing yang terdiri dari pemerintah maupun swasta dari luar negeri yang disebut dengan penanaman modal asing.<sup>12</sup>

Berkaca pada hal tersebut, maka arah kebijakan luar negeri Indonesia harusnya sudah dapat dibaca. Politik Luar Negeri Indonesia kemudian harus diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara -negara sahabat serta badan -badan Internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus

---

<sup>12</sup> SBY : Politik Luar Negeri adalah Bagian dari Upaya Mencapai Kepentingan Nasional, dalam [www.madina.co.id](http://www.madina.co.id), diakses 15 Januari 2012

mengupayakan pulihnya kepercayaan Internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Dengan demikian langkah yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan berkenaan dengan peningkatan kinerja implementasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah meningkatkan kemampuan diplomasi Indonesia untuk memulihkan kepercayaan Internasional terhadap kematangan Indonesia sebagai sebuah Bangsa.

Hal ini lah yang nampaknya disadari oleh SBY beserta segenap anggota kabinet Indonesia bersatunya bahwa keunggulan diplomasi akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan pembangunan dan menjaga integritas bangsa, maupun untuk memperkuat posisi tawar dalam rangka hubungan diplomatiknya. Oleh karenanya meningkatkan keunggulan diplomasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan setiap negara tak terkecuali Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada Pembukaan The Indonesian Council on World Affairs (ICWA)<sup>13</sup> telah memperkenalkan suatu pendekatan baru dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri Indonesia dimasa mendatang yakni melalui pendekatan “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup> Speech Before The Indonesian Council on World Affairs (ICWA) in Jakarta 19 May 2005

mengembangkan lima macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dan membangun dalam artian memiliki kapasitas diplomasi, intelektual dan emosional untuk mengelola kerumitan permasalahan luar negeri (2) mengusung misi sebagai agen perubahan, pencetus perdamaian, pemberi solusi dan media perantara yang relevan dengan kebutuhan kepentingan nasional, masyarakat dan komunitas Internasional. (3) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan Internasional; (4) identitas Internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya serta (5) kebijakan yang merepresentasikan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera

Ditengah keterpurukan paska krisis moneter dan perubahan peta geopolitik dalam negeri sejak era reformasi Indonesia harus mengupayakan peningkatan kemampuan diplomasinya untuk menumbuhkan kepercayaan dunia Internasional. Kepercayaan dunia Internasional memiliki kaitan erat dengan program-program pencapaian kepentingan nasional dan diharapkan mampu memberikan kemudahan baik dalam pencapaian kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Mengingat hal tersebut, maka kebutuhan akan



informasi tentang produk-produk kebijakan luar negeri Pemerintah saat ini dianggap sangat relevan.

### **C . Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang diterapkan dalam periode kedua pemerintahan SBY berhasil mencapai kepentingan nasional yang dituju ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji hubungan siklis antara produk kebijakan politik luar negeri yang diterapkan SBY saat ini dengan kepentingan nasional Indonesia yang berhasil dicapai.
2. Untuk mencari pemahaman akan kinerja implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dapat mengarah pada proyeksi pola tingkah laku Indonesia di lingkup masyarakat Internasional kedepannya.

## **E. Landasan Teori/Konseptual**

Dalam menganalisa suatu permasalahan, diperlukan kerangka pemikiran sebagai acuan. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu terjadi.<sup>14</sup>

Untuk mendeskripsikan permasalahan yang sudah dinyatakan dalam rumusan masalah diatas, akan digunakan beberapa teori dan konsep. Antara lain adalah:

### **1. Level of Analysis (Level Analisis)**

Level of Analysis<sup>15</sup> merupakan cara untuk mengerti atau memahami politik dunia Internasional yang disetujui oleh banyak pakar hubungan Internasional. Level analisis ini juga dapat dipakai sebagai landasan suatu negara mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya. Ada tiga level analisis yang dapat digunakan menurut Kenneth Waltz, yaitu: 1) level individu; 2) level negara/domestik; dan 3) sistem Internasional.<sup>16</sup>

Penggunaan level analisis untuk menjelaskan fenomena yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah karena adanya indikasi bahwa secara

---

<sup>14</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.186

<sup>15</sup> Dalam buku *World Politics: Trend and Transformation*, Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf mendeskripsikan Level of Analysis sebagai "...the different aspects of and agents in international affairs that may be stressed in interpreting world politics and explaining global phenomena, depending on whether the analyst chooses the focus on "wholes" (the complete global system and large collectivities) or on "parts" (individual states or people...".

<sup>16</sup> Mochtar Mas' oed,, op.cit, p40

individu, SBY merupakan seorang diplomat handal yang terbukti dari kesuksesan produk kebijakan-kebijakan luar negerinya dengan tolak ukur terkait kecenderungannya menggunakan pencitraan sebagai senjata politiknya serta kecenderungannya dalam membuat identitas-identitas symbolic atau monumental selama masa kepemimpinannya. Dengan kata lain, level analisis digunakan untuk mempelajari pendekatan yang digunakan Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan SBY dalam meramu kebijakan luar negerinya. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa sebenarnya politik luar negeri ditetapkan oleh para individu pembuat keputusan. Merekalah yang mendefinisikan tujuan, memilih alternatif tindakan untuk mencapai dan memanfaatkan kemampuan nasional untuk mencapai tujuan itu *atas nama negara*. Karena itu yang perlu dipelajari adalah ideologi, motivasi, ideal, persepsi, nilai, sikap, perilaku atau kebiasaan para individu yang berwenang membuat keputusan atas nama negara.<sup>17</sup>

Selain level individu, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga dapat ditelaah melalui level analisis negara/bangsa. Karakteristik politik luar negeri Indonesia dari sudut pandang analisis di level ini menyatakan bahwa *output* kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan dasar ideologi, proses pembuatan keputusan, dinamika sistem politik dan sebagainya.<sup>18</sup>

Contoh analisa pada level ini didukung oleh teori politik luar negeri yang

---

<sup>17</sup> Ibid, hal.47

<sup>18</sup> Ibid, hal.44

dikembangkan oleh Richard C. Snyder dan James N. Rosenau<sup>19</sup> dimana mereka menjelaskan perilaku negara-negara di area Internasional terutama dengan menelaah kondisi-kondisi dalam negeri yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Perang, persekutuan, imperialisme, manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi sosial dalam negeri. Menurut teori mereka ini, pemerintah tidak sekedar bereaksi terhadap lingkungan eksternal atau terhadap keseimbangan atau ketidak seimbangan Internasional. Tindakan pemerintah itu juga merupakan perwujudan dari kebutuhan dan nilai-nilai warga dan pemimpin politik negara mereka sendiri.

Level Negara ditunjukkan dengan misi menyelaraskan tujuan nasional dan kepentingan nasional dalam agenda-agenda kenegaraan yang dijalani Presiden sebagai representasi negara. Tujuan kepentingan Nasional dalam hirarki *strategy and force planning*, menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah turunan dari kepentingan nasional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kepentingan nasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar, misalnya integritas wilayah, kedaulatan dan keselamatan rakyat.

Tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan

---

<sup>19</sup> Richard C. Snyder dan James N. Rosenau dalam Mochtar Mas' oed, Ibid, hal.45

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”<sup>20</sup>.

Dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bercorak:

- a. Mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan,
- b. Memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi, dan
- c. Memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial,

Dalam mencapai tujuan Nasional, Pemerintahan SBY menggunakan pendekatan yang mirip dengan pendekatan yang digunakan oleh dua Presiden penerap konsep politik mercusuar dalam pemerintahannya yaitu Soekarno dan Soeharto. SBY menerapkan gaya Soekarno sebagai presiden yang populis dan pengutamakan afiliasi melalui penampilannya di depan publik, berupa bahasa tubuh yang ekspresif walaupun tanpa diikuti mimik yang kuat dalam tiap kalimat yang diucapkan serta menjaga aksentuasi dan vibrasi sebagaimana yang dilakukan Oleh Soekarno maupun Soeharto.

---

<sup>20</sup> Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4

Melihat kecenderungan menggunakan pencitraan di lingkup politik domestik dengan metode publikasi personal ini ditambah pertimbangan bahwa Indonesia sedang mengalami degradasi citra positif di mata Internasional, maka besar kemungkinan misi yang diusung oleh pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan SBY dalam proses diplomasi kenegaraannya adalah untuk membangkitkan kembali *National Prestige* yaitu pendekatan Politik Luar negeri yang digunakan untuk mencapai kedua kepentingan dan tujuan Nasional Bangsa Indonesia melalui pembangunan *Image* atau pencitraan untuk memulihkan kembali citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara di sektor makro dan mikro.

Konsep Citra atau *image* menurut Kenneth E Boulding. Pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan suatu Negara akan sangat tergantung pada Image Negara tersebut terhadap objeknya. Image suatu Negara merupakan cara pandang Negara-negara lain terhadap Negara tersebut yang dipengaruhi oleh citra Negara tersebut yang akan mempengaruhi hubungan Negara itu dengan Negara-negara lain di dunia Internasional.<sup>21</sup>

Juga dijelaskan tentang konsep citra oleh Kenneth Boulding bahwa “kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi

---

<sup>21</sup> Dicantumkan dalam materi kuliah Teori Hubungan Internasional oleh Prof. Tulus Warsito

yg obyektif tetapi citra mereka tentang situasi itu. yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia”.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kepentingan Nasional

Secara umum, definisi kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta factor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>23</sup>

Kelangsungan hidup bangsa dan negara ( *self preservation*) diartikan sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya di dunia Internasional. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan negara lain terhadap keberadaan suatu negara dan kesediaan negara lain untuk menjalain hubungan diplomatik dengan negara tersebut dalam pergaulan Internasional.

---

<sup>22</sup> Mochtar Masoed, *Teori dan Cara Metodologi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: pusat antar universitas studi sosial ugm, 1988), hal 19-20

Dicantumkan didalam materi kuliah Diplomasi Kebudayaan UMY

<sup>23</sup> JACK C PLANO& ROY OLTON ,*The internatioanl relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, third edition, Clio Press Ltd, England, 1982

Kemerdekaan (*independence*) diartikan sebagai kesanggupan suatu negara untuk menyatakan mampu berdiri sendiri menentukan nasibnya dibawah pemerintahannya sendiri terlepas dari belenggu penjajahan dan kolonialisme termasuk dalam menentukan sikap dan arah kebijakan politiknya. Kemerdekaan sangat penting bagi suatu negara terkait eksistensinya di kancah Internasional karena tanpa kemerdekaan maka tidak akan ada pengakuan dari negara lain.

Keutuhan wilayah (*territorial integrity*) diartikan sebagai bentuk kedaulatan suatu negara dimana pengakuan terhadap wilayah atau teritori kekuasaan suatu negara menunjukkan eksistensi negara tersebut di politik Internasional. Pengakuan terhadap segala bentuk pemerintahan dan kebijakan negara dalam wilayah kedaulatannya serta hak untuk mengeksplorasi segala kekayaan dalam batasan wilayah negaranya juga menunjukkan pengakuan Internasional terhadap negara tersebut.

Kesatuan wilayah atau keamanan wilayah juga turut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik suatu negara yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu negara.

Keamanan militer (*military security*) penulis definisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam mengontrol stabilitas keamanan dalam negerinya serta memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala ancaman dari dalam maupun luar. Keamanan militer juga menunjukkan



kemampuan suatu negara dalam mempertahankan pemerintahannya, serta menjaga kedaulatan dan kesatuan wilayahnya dari potensi serangan negara lain yang membahayakan rakyat kemerdekaannya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa negara dengan militer yang kuat, akan memiliki *bargaining power* yang kuat di politik Internasional.

Sementara kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*) penulis terjemahkan sebagai kemampuan negara untuk menyokong kehidupan rakyatnya (*life sustainability*) dari segi ekonomi dan standar kehidupan yang layak. Stabilitas ekonomi yang baik dan pertumbuhan rasio ekonomi yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, tingkat pendidikan, pelayanan publik dan kesehatan serta tingkat kemajuan dan pembangunan dalam negeri.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional"<sup>24</sup>. Dalam hal

---

<sup>24</sup> T.May Rudy, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116

pengklasifikasian sasaran strategik politik luar negeri Indonesia inilah penggunaan teori kepentingan nasional diperlukan dalam penelitian ini

Sedangkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang dilandaskan pada kepentingan nasional yang relevan dengan penelitian ini sendiri dapat dideskripsikan sebagai cerminan arah politik luar negeri yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sejak periode 1999-2004<sup>25</sup>, yang menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:

1. menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional;
2. ikut serta di dalam perjanjian Internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;
3. memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;
4. meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan Internasional;
5. mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas;

---

<sup>25</sup> ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 tanggal 19 oktober 1999

6. memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga; mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah asia tenggara.

Hal ini masih dikatakan berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional yang ingin dicapai saat ini karena corak kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, sebagian diantaranya masih berpedoman pada landasan operasional tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai langkah suksesi pemerintahan SBY terhadap target pencapaian politik luar negeri jangka panjang pemerintah Indonesia dari rezim pemerintahan sebelumnya.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan

pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.<sup>26</sup>

Dengan pertimbangan tersebut Pemerintahan SBY meletakkan landasan operasional politik luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional dalam Sasaran subbidang politik luar negeri Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014<sup>27</sup>, yaitu meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015
2. Peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. Hal ini erat kaitannya dengan kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime, TOC*) yang merongrong *human security*, terjadinya perpindahan warga beberapa negara di Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tenggara akibat konflik internal dan instabilitas politik, isu-isu keamanan nontradisional seperti kelangkaan pangan dan energi dunia yang saat ini berpengaruh pada keamanan dan

---

<sup>26</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

<sup>27</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II, Bab IV Politik

perdamaian dunia, isu kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan dan penyakit menular, meningkatnya integrasi ekonomi global dan serangan terorisme, ancaman konflik antarnegara terhadap stabilitas regional dan perdamaian dunia, dan ancaman penyebaran senjata nuklir, senjata radiologi, dan senjata kimia serta senjata biologi

3. Diplomasi perbatasan yang terkoordinasi untuk menjaga keutuhan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia serta menjaga kekayaan sumber daya alam nasional
4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
5. Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
6. Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
7. Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
8. Peran Serta Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)

Adapun bentuk kongkrit dari Kepentingan Nasional Indonesia yang diperjuangkan oleh pemerintahan SBY dapat dijabarkan secara khusus sebagai berikut<sup>28</sup> : memantapkan sasaran pembangunan hubungan luar negeri yaitu mempertegas peran dan kepemimpinan Indonesia dalam implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ; memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai negara demokratis di dunia; ;Penyelesaian masalah *border*

---

<sup>28</sup> Dikutip dari laman resmi kementerian luar negeri ([www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id))

*diplomacy*<sup>29</sup> yang melingkupi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar<sup>30</sup> ; diplomasi ekonomi untuk sumber pendanaan pembangunan nasional (*multitrack diplomacy*) ; perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor Indonesia ; memperjuangkan peningkatan sektor pariwisata, absorpsi tenaga kerja; deteksi dan penanggulangan bersama terhadap kejahatan lintas batas/negara serta *jaringan terorisme Internasional*<sup>31</sup> yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan domestik Indonesia ; serta membangun kemitraan strategis yang menunjang pencapaian kepentingan-kepentingan Indonesia dalam isu yang lain seperti HAM dan lingkungan.

## **F. HIPOTESA**

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut, “kebijakan luar negeri Indonesia yang diterapkan dalam periode kedua Pemerintahan SBY berhasil mencapai kepentingan nasional”. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan nasional Indonesia yang dijabarkan sebagai sasaran subbidang politik luar negeri Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014

Adapun keberhasilan yang diasumsikan adalah :

---

<sup>29</sup> Menindaklanjuti 16 perjanjian tentang perbatasan yang telah dicapai dalam 44 pertemuan selama 2009-2010

<sup>30</sup> Tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP setiap tahunnya.

<sup>31</sup> Diupayakan melalui pendirian Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2010 berdasarkan Perpres No.46 tahun 2010

1. meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN dengan indikator diadopsinya berbagai prakarsa dan gagasan dimana Indonesia terlibat untuk mendorong pelaksanaan rencana aksi pembentukan komunitas ASEAN;
2. meningkatnya citra Indonesia di dunia Internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya yang ditandai dengan diterimanya Indonesia secara meluas sebagai negara demokratis yang menghormati HAM dan memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, serta partisipasi aktif Indonesia untuk mempercepat pembentukan rezim Internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan nasional Indonesia;
3. meningkatnya peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum multilateral, dengan indikator partisipasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang;

Secara terperinci kepentingan nasional yang berhasil dicapai dapat dideskripsikan sebagai :

- a. tewujudnya peran vital Indonesia di kawasan Asia Tenggara khususnya peranan dalam organisasi regional setingkat ASEAN,

- b. terwujudnya kontribusi optimal dari pemerintah Indonesia yang diakui oleh Internasional dalam hal perkembangan demokrasi global dan domestik,
- c. perkembangan signifikan dalam hal jumlah pertemuan dan kesepakatan terkait perbatasan (*border*) dan keamanan nasional yang diratifikasi dengan Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan RI,
- d. perkembangan perekonomian domestik terkait tingkat resistensi sistem perekonomian Indonesia terhadap krisis ekonomi Global maupun peningkatan peran Indonesia dalam forum ekonomi dunia, pengakuan dunia terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor Indonesia,
- e. peningkatan jumlah dan minat wisatawan terhadap objek-objek wisata di Indonesia,
- f. meningkatnya absorsi tenaga kerja dan kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja / BHI dengan diratifikasinya sejumlah perjanjian terkait ketenaga kerjaan,
- g. kemajuan dibidang hankam termasuk upaya pemberantasan kriminal lintas negara dan terorisme serta peningkatan kerjasama-kerjasama strategis di berbagai bidang dengan negara-negara lain di dunia.



Indikasi yang memperkuat hipotesa ini adalah penulis berasumsi bahwa ada kecenderungan untuk melanjutkan trend positif sebagaimana pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh SBY pada periode pertama pemerintahannya dengan upaya mengusung kepentingan nasional yang direfleksikan dalam agenda kenegaraan Presiden maupun kabinet dalam pemerintahan ditinjau dari evaluasi kinerja RPJMN 2010-2014.

## **G. METODOLOGI PENELITIAN.**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder atau system *Library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari literature-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang mendukung dan relevan serta terkait sebagai dokumentasi *research metode* dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Kajian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif, yang berarti data dan fakta yang diperoleh dan berdasarkan teori akan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan atau korelasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

### 3. Analisa Data

Data-data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis isi secara deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menelaah kasus-kasus umum secara seksama sampai menemukan suatu pola dalam banyak-banyak kasus umum dan kemudian mengembangkan suatu prinsip hubungan khusus.

## **H. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penelitian ini akan menitik beratkan pada produk-produk kebijakan luar negeri Indonesia serta analisis terhadap agenda-agenda resmi kenegaraan Presiden dan kabinet yang memiliki implikasi terhadap upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia dan kebijakan yang menjadi landasan operasional politik luar negeri Indonesia.

Mengingat luasnya pembahasan tentang politik luar negeri dan dengan pertimbangan untuk menghindari bias dalam definisi politik luar negeri, maka dinamika politik luar negeri Indonesia yang dimaksud dalam skripsi ini hanya dipaparkan dari agenda-agenda kepresidenan dan kabinet yang bersumber dari situs resmi kepresidenan<sup>32</sup>. Batasan waktunya adalah sejak dimulainya periode ke dua pemerintahan SBY yaitu bulan Oktober tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2012 sekarang.

---

<sup>32</sup> [www.presidentri.go.id](http://www.presidentri.go.id)

Penelitian tentang Kepentingan nasional Indonesia yang difokuskan dalam penelitian ini dibatasi pada kepentingan nasional Indonesia yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2010-2014 pada Bab ke-VI tentang Politik dan subbidang politik luar negeri. Namun demikian, dari 8 kepentingan nasional yang dimuat dalam RAPJMN 2010-2014, penulis hanya menyertakan 3 dari kepentingan nasional tersebut untuk dijadikan fokus dalam skripsi ini yaitu :

1. Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Pemilihan poin pertama dalam RPJMN 2009-2014 ini didasarkan pada pertimbangan posisi ASEAN sebagai prioritas dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia serta kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2011.
2. Peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya. Pemilihan poin ke lima dalam RAPJMN 2009-2014 ini didasarkan pada pertimbangan Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan dan keaneka ragaman hayati terbesar di dunia, serta Indonesia sebagai negara dengan ragam budaya terbesar di dunia. Kepentingan Indonesia dalam menghapus stigma negatif terkait pelanggaran HAM internasional juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan poin ini.

### 3. Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi

Pemilihan poin ke tujuh dalam RAPJMN 2009-2014 ini didasarkan pada pertimbangan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN serta merupakan satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang termasuk dalam anggota G-20.

Penelitian ini juga akan menyertakan beberapa produk kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden SBY dari periode sebelumnya baik sebagai variabel pembanding maupun variabel pendukung dalam penelitian ini.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat sehingga pada hasilnya diharapkan dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bagian ini berisi tentang agenda kenegaraan Presiden dan kabinet. Penulis menggunakan daftar riset terhadap tahap-tahap

agenda Internasional yang merepresentasikan negara sejak tahun 2009 sampai sekarang.

**BAB III** : Bagian ini berisi tentang pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan agenda kenegaraan Presiden dan kabinet. Riset terhadap tahap-tahap agenda Internasional yang merepresentasikan negara dianalisis untuk menunjukkan kaitannya dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional.

**BAB IV** : Bab ini akan menganalisis permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan di dalam hipotesa sebelumnya.. Penjabaran ini disertai dengan data-data yang menunjang fakta tentang pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di forum Internasional dalam periode kedua pemerintahan SBY di Indonesia

**BAB V** : Bab penutup, Bab ini berisi kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V.